

BAB III KONFLIK SURIAH

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang profil negara Suriah secara umum dan bagaimana konflik yang terjadi di Suriah. Penjelasan akan diawali dengan latar belakang terjadinya konflik, situasi ketika konflik terjadi, respon terhadap konflik tersebut, baik dari internal Suriah maupun eksternal, hingga dampak-dampak yang disebabkan oleh konflik tersebut. Penulis juga akan menuliskan tentang peran dan kontribusi NGO dalam memberikan bantuan bagi korban dari konflik Suriah tersebut.

A. Profil Negara Suriah

Suriah (Syria) memiliki nama resmi Republik Arab Suriah, merupakan sebuah negara yang berada di wilayah Asia barat. Negara ini berbatasan dengan Lebanon dan Laut Mediterania di sebelah barat, berbatasan dengan Negara Turki di sebelah utara dan di sebelah timur berbatasan dengan Yordania Selatan dan Israel. (Manshur, 2014)

Suriah adalah negara dengan dataran yang subur, pegunungan tinggi dan padang pasir. Negara ini dihuni oleh warga dari berbagai etnis dan kondisi agama yang heterogen, seperti Alawite, Sunni dan Kristen Arab, Armenia, Druze, Assyria, Kurdi, dan Turki. Kelompok penduduk yang meyoritas di Suriah adalah Muslim Arab Sunni. (Manshur, 2014)

Pertumbuhan populasi di Suriah berada pada tingkat yang tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata dunia. Begitupun dengan tingkat harapan hidup di Suriah yang berada jauh di atas rata-rata. Pada awal abad ke-21, secara keseluruhan, sekitar sepertiga warga Suriah berada di bawah usia 15 tahun dan hampir sepertiga lainnya memiliki rentang usia antara 15 dan 30 tahun. (Britannica, 2019)

Gambar 3.1. Peta Suriah



Sumber: <https://www.istanbul-city-guide.com/map/syria/aleppo-map.asp>

Di Suriah, pertanian menjadi sumber pendapatan yang penting. Pertanian menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar seperempat dari populasi Suriah. Dalam pertanian Suriah, gandum menjadi tanaman yang paling penting, produksi gandum terus menerus mengalami fluktuasi besar dalam curah hujan. selain itu, kapas menjadi tanaman untuk ekspor yang paling besar. Buah-buahan dan sayuran juga banyak tumbuh di negara ini seperti tomat, melon, kentang, bawang, zaitun, anggur, apel, jeruk, dan lain sebagainya. Tidak hanya dalam aspek pertanian, kegiatan perternakan juga menjadi hal yang penting, dimana warga banyak memelihara hewan ternak seperti domba, sapi, unta, dan unggas. (Britannica, 2019)

Ibu kota Suriah berlokasi di Damaskus. Dahulu, Damaskus memiliki nama Bilad al-Sham atau tanah Sham. Sham sendiri berasal dari kata Shem, yang merupakan putra tertua dari Nabi Nuh, dimana ia memilih untuk tinggal di wilayah tersebut setelah terjadinya banjir bandang.

Diperkirakan bahwa Damaskus adalah kota paling tua di dunia yang telah berdiri mulai dari 6000 tahun SM, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Damaskus sudah ada sejak 8000 tahun SM. (Muhammad, 2016)

Suriah memiliki sejarah yang panjang, dimana negara ini pernah menjadi wilayah bekas jajahan kerajaan Assiria di tahun 732 SM, yang ketika itu kerajaan ini dipimpin oleh Raja Tiglath Pileser III. Selanjutnya pada tahun 572 SM, Damaskus jatuh ke kekuasaan Nabukadnesar yang berasal dari Neo-Babilonia. Kemudian Damaskus akhirnya jatuh ke tangan Raja Cyrus dari Persia di tahun 538 SM, dan sejak saat itu pusat pemerintahan dan militer Provinsi Suriah berada di Damaskus. (Rohmawati, 2014)

Dibawah komando Khalid bin Walid, Islam berhasil masuk ke Suriah pada 25 Februari 635. Ketika itu, Khalid bin Walid berhasil mengalahkan musuhnya. Dan dua minggu selanjutnya, Khalid akhirnya dapat berdiri di gerbang Damaskus. (Rohmawati, 2014)

Suriah adalah salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang keberadaannya mulai diperhitungkan pasca Perang Teluk. Hal ini dikarenakan adanya anggapan jika perdamaian Suriah tidak akan terjadi tanpa adanya peran dari Suriah. Dahulu Suriah merupakan sebuah negara yang memiliki banyak wilayah, dimana seluruh negara yang berada di Timur Mediterania termasuk di dalamnya, seperti Yordania, Israel, Lebanon serta Provinsi Turki Hatay. Namun, karena imperialis Eropa, Suriah harus kehilangan wilayahnya yakni Yordania dan Israel yang dipisahkan dan akhirnya berada di bawah mandat Inggris. Sementara Lebanon diambil guna memberikan perlindungan bagi minoritas kristennya dan Provinsi Hatay dikembalikan ke Turki dengan pertimbangan politik untuk Prancis. (Muhammad, 2016)

Dengan politik *divide et impera* nya, Perancis sukses membagi negara Suriah kedalam 4 wilayah, yaitu Damaskus,

Lebanon Raya, Aleppo dan Lantakia. Di tahun 1952, Damaskus dan Aleppo dikembalikan pada Suriah, dan pada 28 September 1941, Prancis memberikan kemerdekaan kepada Suriah yang disusul dengan proklamasi kemerdekaan Lebanon di tanggal 26 November 1941. (Muhammad, 2016)

Berdasarkan sejarahnya, sistem pemerintahan yang dimiliki oleh Suriah mengalami perubahan dari yang sebelumnya menggunakan sistem Monarki (Kerajaan) menjadi Republik. Awal perubahan ini terjadi ketika Suriah sudah merdeka dari penjajahan Prancis. Akan tetapi, perubahan sistem tersebut tidak juga memperbaiki kondisi negara Suriah. Telah terhitung sebanyak tujuh kali kekuasaan di Suriah mengalami kudeta secara berturut-turut. Setelah kejadian kudeta tersebut, pemerintahan Suriah pun dipimpin oleh Presiden Hafez Al-Assad (1971-2000). (Muhammad, 2016)

B. Konflik Suriah

Konflik yang terjadi di Suriah merupakan salah satu kejadian yang termasuk dalam fenomena *Arab Spring* yang menyebar di beberapa negara yang terletak di kawasan Timur Tengah. Konflik ini begitu kompleks karena melibatkan aktor-aktor yang beragam, seperti adanya peran dari negara-negara lain, kelompok-kelompok yang mendukung, dan dari pihak pemberontak. (Arromadloni, 2017)

Arab Spring merupakan sebuah istilah dari fenomena yang terjadi di Timur Tengah, yaitu adanya rangkaian protes dan gerakan demonstrasi pada akhir tahun 2010 hingga pertengahan tahun 2011, dimana pemerintah pada berbagai negara di kawasan Timur Tengah menghadapi serangkaian aksi demonstrasi yang diorganisir oleh aktivis-aktivis pemuda. (Umar, Darmawan, Sufa, & Ndadari, 2014) Fenomena ini pertama kali berawal dari sebuah kejadian di Tunisia pada tanggal 17 Desember 2010, yaitu ketika terjadi pembakaran diri yang dilakukan oleh salah satu warga Tunisia,

Mohammed Boauzizi sebagai bentuk protes atas korupsi dan tindakan semena-mena yang diperbuat oleh pemerintah Tunisia. (Hermawan, 2016)

Aksi yang terjadi di Tunisia itu pun selanjutnya menginspirasi warga di negara-negara lainnya untuk melakukan perlawanan yang serupa, hal tersebut terjadi di Aljazair, Yordania, Mesir, Yaman, dan negara-negara lainnya, termasuk Negara Suriah. (Hermawan, 2016)

Secara umum, protes yang terjadi merupakan respon dari ketidakpuasan warga terhadap rezim yang bersikap otoriter. Pada awalnya demonstrasi secara umum terjadi tanpa kekerasan, namun berkembang menjadi aksi yang lebih keras, bahkan menjadi perang saudara. Peningkatan aksi menjadi sebuah kekerasan ini adalah tanggapan terhadap tindakan keras yang juga dilakukan oleh pemerintah atau sebuah kegagalan demonstrasi damai dalam menuntut perubahan terhadap kebijakan. Meskipun ada banyak kesamaan dari aksi protes yang terjadi di berbagai negara, namun kondisi dan hasil di setiap negara dapat bermacam-macam. (Marshall)

Peristiwa *Arab Spring* dan efek domino dari kejatuhan pemerintahan di beberapa negara di kawasan Timur Tengah menjadi bayang-bayang yang menakutkan bagi pemerintahan Suriah. Dimana karena hal tersebut, protes-protes atas ketidakpuasan warga Suriah terhadap pemerintah semakin terlihat dan menimbulkan gerakan besar yang terbuka di negara Suriah. Konflik juga menjadi begitu kompleks dengan adanya keterlibatan kelompok-kelompok transnasional yang datang dari berbagai negara. (Mulyana, Akim, & Sari, 2016)

Konflik Suriah ini pertama kali dilatarbelakangi oleh pembeotakan dari warga Suriah terhadap pemerintahan yang berkuasa, dimana mereka menginginkan agar Presiden Basahr Al-Assad segera turun dari jabatannya, mereka juga menuntut berakhirnya pemerintahan Partai Baath yang berkuasa di

Suriah selama lima dekade. (Kinsal, *Penyelesaian Konflik Internal Suriah menurut Hukum Internasional*, 2014)

Sejak negara Suriah merdeka di tahun 1946, Negara ini sudah mengalami situasi politik yang tidak stabil, dimana antara sosialis, agamis, maupun kelompok politik mempunyai hubungan yang bisa dikatakan kurang baik. Sistem politik otoritarian di Suriah telah ditandai sejak kepemimpinan Presiden Hafiz Al-Assad. (Muhammad, 2016). Presiden Hafez Al-Assad mulai memerintah negara Suriah pada tanggal 22 Februari 1971 dan berakhir pada Juni 2000. Hafez Al-Assad telah berkuasa di Suriah selama lebih dari 30 tahun, tidak heran jika ia menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di Suriah, termasuk di wilayah Timur Tengah. (Hermawan, 2016)

Pada tahun 2000, ketika Hafiz Al-Assad meninggal dunia, jabatan kepresidenannya digantikan oleh Bashar Al-Assad yang merupakan anak kandungnya. (Muhammad, 2016) Pada tanggal 17 Juli 2000, Bashar Al-Assad dilantik menjadi presiden Suriah secara resmi untuk 7 tahun jabatan kepemimpinan. Saat dilantik menjadi pemimpin Suriah, ia berjanji untuk membuat negara Suriah menjadi lebih demokratis. Bashar Al-Assad juga mengatakan dalam situs resminya bahwa ia akan membuat zona perdagangan bebas, selain itu ia akan memberi izin lebih banyak bagi koran swasta, melakukan pemberantasan korupsi dan adanya pemborosan terhadap keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah. (Hermawan, 2016)

Sebelum terjadi aksi demonstrasi dan protes yang menuntut berakhirnya rezim Assad, warga Suriah sudah banyak yang mengeluhkan kondisi Suriah yang mengalami banyak masalah, yaitu angka pengangguran yang begitu tinggi, banyaknya korupsi yang terjadi di kalangan pegawai negeri, serta tidak adanya kebebasan dalam politik. (BBC, 2018)

Konflik suriah pertama kali dipicu oleh kejadian pada tahun 2011, dimana sekelompok pelajar di kota Dara berjumlah 15 orang dengan rentang usia 9-15 tahun yang menuliskan grafiti dan slogan-slogan bertuliskan “Rakyat menginginkan rezim turun.”, sebuah bentuk protes terhadap pemerintah Bashar Al Assad. Kejadian ini kemungkinan besar mendapatkan inspirasi dari situasi yang terjadi di Tunisia dan Mesir, dimana di kedua negara tersebut terjadi pergolakan yang menuntut agar rezim yang berkuasa segera berakhir. Adanya aktifitas pelajar yang menuliskan slogan tersebut, membuat pemerintah menangkap dan memenjarakan mereka. Selama berada dalam tahanan, para pelajar tersebut pun mengalami penyiksaan yang baru diketahui ketika mereka telah dibebaskan. (Fahham & Kartaatmaja, 2014) Pemerintah Bashar Al-Assad menahan dan melakukan penyiksaan terhadap para pelajar tersebut selama berminggu-minggu. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah tersebut menggambarkan sikap represif dan brutal dari rezim. (Winsor & Baker, 2018)

Perlakuan pemerintah terhadap sekelompok pelajar tersebut memicu reaksi protes dari warga Suriah yang menuntut agar para pelajar yang bersangkutan segera dibebaskan. Aksi protes yang dilakukan oleh warga Suriah membuat tentara melakukan perlawanan balik secara berlebihan, mereka menmbaki para demonstiran hingga 4 orang meninggal dunia. Penembakan yang dilakukan tentara bukan malah membuat warga Suriah jera dan menghentikan protesnya, justru protes tersebut berkembang lebih luas hingga menjadi perang sipil yang besar. Perang ini tidak hanya menggunakan senjata- senjata konvensional biasa, namun juga menggunakan senjata- senjata kimia. (Fahham & Kartaatmaja, 2014)

Reaksi dari pemerintah terhadap aksi yang dilakukan oleh para demonstiran, menyebabkan pihak oposisi mulai mengusung senjata mereka pada Juli 2011. Kerusakan mengalami peningkatan yang begitu cepat di Suriah,

begitupun dengan pasukan pemberontak yang meningkat dalam jumlah banyak hingga menjadi ratusan kelompok. Mereka berperang untuk melawan pasukan dari pemerintah. Di tahun 2012, peperangan tersebut mencapai kota-kota penting Suriah, yaitu Damaskus dan Aleppo. Konflik menjadi pertempuran antara pihak oposisi dan pasukan pemerintah, pertempuran ini juga semakin meluas menjadi perlawanan antara mayoritas Sunni dan minoritas Syiah yang sedang menguasai negara Suriah. (BBC, 2018)

Dalam hal ini, kekuatan internet memiliki pengaruh yang cukup penting terhadap konflik yang terjadi di Suriah, dimana situs-situs media sosial seperti facebook, youtube, dan twitter banyak mengeluarkan seruan tentang aksi protes dan demonstrasi secara besar-besaran pada awal Februari 2011, agar pemerintah segera melakukan reformasi. Tidak hanya itu, sebagai persiapan jika terjadi kejadian seperti di Mesir dan Tunisia, kelompok-kelompok yang mendukung reformasi dari luar Suriah memiliki rencana untuk mengirimkan telpon selular, modem satelit, komputer, dan media lainnya. Namun, pengiriman tersebut akhirnya gagal karena diketahui oleh bagian keamanan Suriah. Pihak keamanan Suriah memberikan ancaman jika pengiriman tersebut tetap dilaksanakan. (Rohmawati, 2014)

Di awal bulan february 2011, terdapat seruan “Day of Rage” demonstrasi besar di semua wilayah Suriah pada tanggal 4 dan 5 Februari yang bertujuan untuk meminta pemerintah Suriah segera melakukan reformasi. Hal ini dilakukan oleh situs-situs media sosial dari dalam maupun luar negara Suriah, dengan harapan agar tindakan ini dapat memiliki dampak yang serupa seperti di negara Mesir dan Tunisia. Namun di Suriah, sejumlah aktivis diberi peringatan bahkan ancaman oleh pihak keamanan Suriah agar tidak melakukan aksi demonstrasi tersebut. (Hermawan, 2016)

Pada tanggal 23 Maret 2011, aksi demonstrasi berulang kembali di kota Daara. Untuk melawan para demonstiran

tersebut, pasukan keamanan kembali melakukan penembakan yang menjatuhkan korban meninggal dunia sebanyak 20 orang. Setelah kejadian tersebut, Baashar Al-Assaad mengeluarkan pengumuman bahwa pemerintah Suriah saat itu sedang mempertimbangkan untuk melakukan reformasi politik, termasuk di dalamnya adalah menghapus pembatasan partai politik serta menghapus hukum darurat Suriah yang telah dijalani Suriah selama 48 tahun lamanya. Akan tetapi, pemberitahuan dari pemerintah tersebut tidak dihiraukan oleh para tokoh dari pihak oposisi Suriah. (Fahham & Kartaatmaja, 2014)

Seiring konflik yang terjadi semakin membesar dan meluas, para pihak oposisi yang menentang pemerintahan Bashar Al-Assad ini pun bersatu dan bergerak dengan terorganisir di bawah bendera *Free Syrian Army* (FSA) atau Tentara Pembebasan Suriah. (Kinsal, Penyelesaian Konflik Internal Suriah menurut Hukum Internasional, 2014) Tentara Pembebasan Suriah merupakan kelompok oposisi bersenjata yang melakukan aktifitasnya di Suriah. Organisasi ini telah beroperasi sejak musim panas tahun 2011, dibentuk pertama kali oleh kolonel Riad Al-Assad, salah satu elit militer Suriah yang membelot dari militer Suriah dan melarikan diri ke Turki. Anggota FSA terdiri dari para personel angkatan bersenjata Suriah yang membelot dan juga sejumlah masyarakat sipil yang memiliki keinginan untuk melawan militer Suriah dan menjatuhkan rezim AlAssad. Tentara Pembebasan Suriah ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk melengserkan Bashar Al-Assad dari jabatannya sebagai presiden Suriah. (Abdullah, 2017)

Terdapat empat pilar yang menjadi dasar atas pembangunan Rezim Bashar Al-Assad yang merupakan pilar dari rezim ayahnya yang memerintah Suriah sebelumnya. Keempat pilar tersebut adalah pertama, kekuasaan berada di tangan klan Al-Assad; kedua, menyatukan kaum minoritas Alawita; ketiga, mengatur dan mengawasi semua aparatur

militer-intelijen; dan yang keempat adalah memonopoli partai Ba'ath dalam sistem politik yang berlaku. (Rohmawati, 2014)

Dalam memberlakukan undang-undang darurat, Bashar Al-Assad menggunakan cara-cara yang tidak disukai oleh sebagian warga Suriah, yaitu dengan cara menindas, melakukan tindakan represif terhadap semua bentuk perlawanan, suara-suara yang berbeda serta setiap aspirasi dalam politik yang tidak sejalan dengan politik Bashar Al-Assad. (Rohmawati, 2014)

Bashar Al-Assad pernah menggunakan kekuatan militernya untuk melawan protes yang dilakukan oleh etnis kurdi. Namun ternyata, cara yang digunakan oleh pemerintah menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia. Tindakan-tindakan Rezim inilah yang menimbulkan banyak protes dan sikap kontra dari banyak pihak. (Rohmawati, 2014)

Ada yang berpendapat bahwa konflik yang terjadi di Suriah ini merupakan perang antara dua madzhab yang berbeda, yaitu madzhab sunni dan madzhab syi'ah. Kelompok oposisi pemerintah didominasi oleh Muslim Sunni, sementara mayoritas pemerintah dan pendukungnya adalah dari Alawit Muslim Syiah. Bashar Al-Assad dilaporkan mendapat dukungan mayoritas dari Alawi dan Kristen di negara Suriah. Data yang lain juga mengatakan jika aksi protes dan tuntutan kepada pemerintah paling banyak datang dari kelompok Sunni dan yang paling sedikit adalah dari kelompok Alawite. (Rohmawati, 2014)

Perang ini melibatkan pertanrungan antara dua kekuatan besar disana, yaitu Arab Saudi yang bermadzhab sunni dan Iran yang memiliki madzhab syi'ah. Dalam konflik tersebut, Pemerintahan Bashar Al-Assda mendapat dukungan dari Iran dan gerakan Hizbullah, sedangkan pihak yang kontra terhadap rezim Al-Assad menerima dukungan dari negara-negara dengan madzhab sunni, seperti negara Arab Saudi, Kuwait dan Afghanistan (Fahham & Kartaatmaja, 2014).

150 tokoh dari berbagai kota di Suriah yang memiliki klaim bahwa mereka merupakan perwakilan dari mayoritas etnik serta kelompok-kelompok agama di Suriah membentuk “*National Initiative for Change*” (NIC) atau Prakarsa Nasional untuk Perubahan pada tanggal 22 April 2011. Dengan itu mereka memiliki beberapa tuntutan yang diajukan untuk pemerintah Suriah. Berikut beberapa hal yang menjadi tuntutan mereka (Rohmawati, 2014):

1. Penyiksaan, kekerasan dan pembunuhan segera diakhiri
2. Dibentuknya media yang bebas serta independen
3. Dibebaskannya para tahanan politik dan demonstran yang ditahan
4. Adanya amandemen konstitusi untuk memungkinkannya adanya transisi demokratis, agar Suriah dapat menjadi “Masyarakat yang multi-nasional, multi etnik dan tercipta toleransi antar agama.”
5. Pemilu yang bebas dan adil bagi parlemen nasional dan dewan kota
6. Peradilan yang independen, dimana negara bertanggung jawab atas semua kekejaman
7. Adanya kompensasi untuk para politisa yang berada dalam pengasingan serta tahanan-tahanan politik yang dihilangkan
8. Memisahkan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif
9. Berkomitmen untuk tidak ikut campur dalam urusan Lebanon
10. Melakukan reposisi atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel sebagai garis depan dalam tujuan perpolitikan luar negeri Suriah.

C. Faktor-faktor penyebab konflik Suriah

Dalam konflik Suriah ini, secara garis besar terdapat beberapa sumber atau faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, hal-hal tersebut yakni, terjadinya krisis ekonomi dan kesenjangan pada rakyat Suriah, adanya tuntutan agar dilakukan reformasi dari sebagian rakyat Suriah dan adanya isu mengenai sunni dan syiah di Suriah. (Arfinggo, 2018)

1. Kondisi Ekonomi

Salah satu pemicu terjadinya konflik Suriah ini adalah adanya kesenjangan ekonomu, dimana kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terlalu berpihak kepada militer, dana yang dialokasikan untuk militer hampir mencapai 50%. (Hermawan, 2016)

Suriah menghadapi Inflasi ekonomi yang mengalami peningkatan tinggi, begitupun dengan bertambahnya angka pengangguran di Suriah, selain itu Suriah juga menghadapi kondisi sosial-ekonomi dan politik yang tidak bisa dikendalikan, serta sempitnya kebebasan politik disana. (Arfinggo, 2018)

Suriah menghadapi situasi perekonomian yang cukup sulit dimana produksi minyak mengalami penurunan menjadi 400.000 barel per harinya. Selain itu proses pelayanan publik pun menjadi terhambat akibat krisis yang terjadi, angka kelahiran semakin meninggi, namun disisi lain pendapatan perkapita malah menurun. Kondisi ini semakin dipersulit dengan utang luar negeri yang semakin banyak. Situasi sulit tersebut tidak juga mengalami perbaikan, bahkan di tahun 2011, produksi minyak menurun drastis hingga 385.000 barrel per hari. Hal ini memperburuk kondisi ekonomi di Suriah, karena sperempat dari pendapatan Suriah didapatkan dari hasil ekspor minyak tersebut. Tidak hanya dalam sektor produksi minyak, kondisi pertanian di Suriah pun menghadapi keadaan yang sulit dikarenakan perubahan ekstrem yang terjadi menyebabkan Suriah dan negara-negara Timur Tengah lainnya menjadi semakin kering. (Hermawan, 2016)

Gambar 3.2. Grafik Jumlah Produksi Minyak di Suriah

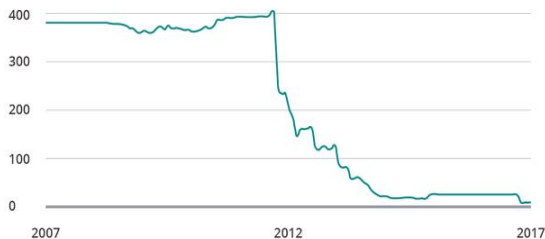
Grafik diatas menunjukkan jumlah produksi minyak di Suriah. Lewat grafik tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2007 hingga tahun 2017, tigtat produksi minyak mengalami kondisi yang tidak stabil, bahkan sejak tahun 2012 hingga 2017, jumlah produksi minyak di Suriah mengalami penurunan yang drastis.

Reformasi dari sisa-sisa sosialisme telah membuka pintu

How Syria's oil production fell

Output has crashed to 5% of what it was before the war

Thousand barrels
per day



Source: xe.com, USEIA, World Bank

bagi investasi swasta, hal ini memicu ledakan konsumerisme di kalangan kelas menengah-atas perkotaan. Namun, privatisasi tersebut hanya menguntungkan sebagian pihak saja, yaitu keluarga kaya dan pihak yang memiliki ikatan khusus dengan rezim. Sementara itu, di provinsi Suriah yang kemudian menjadi pusat pemberontakan konflik melakukan protes ketika biaya hidup semakin melambung, kesempatan kerja langka, dan adanya ketidaksetaraan yang terjadi. (Manfreda, 2019)

Negara Suriah merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan populasi tertinggi di dunia. Berdasarkan data dari PBB, diantara negara-negara dengan pertumbuhan

tercepat, Suriah berada di urutan kesembilan di dunia. Namun dengan kondisi seperti ini, Suriah tidak bisa menyeimbangkan antara tingginya pertumbuhan populasi dengan kondisi ekonomi yang masih lemah, sulitnya mendapatkan makanan, akses pekerjaan dan susahny mendapatkan pendidikan lewat sekolah. Hal-hal inilah yang juga memicu adanya pemberontakan Suriah. (Manfreda, 2019)

2. Tuntutan sebagian rakyat suriah agar dilakukan reformasi.

Ketika Bashar Al-Assad menggantikan kepemimpinan ayahnya di tahun 2000, ia maju ke kursi kepresidenan dengan adanya reputasi tentangnya yang menggambarkan sebagai modernisator dan pembaharu. Namun ternyata, harapan atas kepresidenan Assad sebagian besar tidak terpenuhi dengan baik. Dalam politiknya, Assad kembali membawa praktik otoriter yang dilakukan pada pemerintahan sebelumnya, seperti adanya penyensoran dan pengawasan yang menyeluruh serta tindakan kekerasan yang brutal bagi penentang pemerintahan. (Encyclopaedia Britannica, 2019)

Sebagian dari rakyat Suriah menginginkan adanya reformasi dei negara tersebut. Hal ini mendorong mereka untuk melakukan protes agar Rezim Bashar Al-Assad segera turun dari jabatannya. Dimana Suriah sejak tahun 1963 telah berada di bawah kekuasaan partai Baath. Keluarga Assad sudah memerintah Suriah selama lebih dari empat puluh tahun, akan tetapi di bawah kekuasaan keluarga Assad, Negara Suriah belum bisa dikatakan sebagai negara yang maju dan makmur bagi semua warganya. Maka dari itu, warga Suriah pun mengeluarkan tuntutan agar pemimpin dan rezim di Suriah segera mengalami pergantian untuk negara yang lebih demokratis. (Arfinggo, 2018)

3. Isu tentang Sunni-Syiah

Faktor yang mendorong terjadinya konflik Suriah selanjutnya adalah tentang dominasi dari minoritas Syi'ah Alawiyah dalam aspek perpolitikan di Negara Suriah, adanya dominasi tersebut menumbuhkan sikap diskriminasi kepada madzhab Sunni. Kondisi yang demikian menimbulkan efek yang besar dalam menimbulkan perperangan di antara paham-paham dalam agama Islam. Selain itu, Bashar Al-Assad yang merupakan penganut madzhab Syiah Alawiyah ini mendapatkan pertentangan yang keras dari pihak dengan madzhab islam sunni. Maka tidak heran jika Negara Iran dan Hizbulloh yang memiliki madzhab Syiah memberikan dukungan yang besar bagi pemerintahan Bashar Al-Assad. (Arfinggo, 2018)

Perpolitikan di kawasan Timur Tengah tidak dapat dipisahkan dari adanya konflik antara Madzhab Sunni dan Syi'ah yang berkepanjangan. Konflik Suriah tersebut pun tidak terlepas dari adanya keikutsertaan pihak-pihak lain di balik layar, yaitu antara Amerika Serikat beserta sekutunya yang mayoritas negara Sunni sebagaimana Arab Saudi, Turki, dan Qatar melawan negara Rusia yang mendapat dukungan dari China dan Iran dengan madzhab syi'ah sebagai mayoritasnya. Kedua pihak tersebut yaitu Amerika dan Suriah kerap mengirimkan bantuan-bantuan secara masif. Bantuan-bantuan tersebut berupa uang, alat persenjataan, dan pelatihan militer. (Hermawan, 2016)

D. Dampak Konflik Suriah

ICRC mengeluarkan pernyataan bahwa konflik internal Suriah tersebut berdampak bagi banyak pihak, tidak hanya bagi combatang atau yang terlibat langsung dalam perang, namun juga pada non-combatant, seperti halnya penduduk sipil atau mereka yang tidak ikut terlibat dalam perang tersebut. (Ardila, 2016)

Di Suriah, rakyat Suriah yang akhirnya meninggal dunia mengalami peningkatabn setiap harinya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh sulitnya dalam memperoleh akses makanan dan minuman yang sehat. Banyak sumber air dan makanan di Suriah mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh serangan militer, seperti kerusakan pada perkebunan maupun sumur-sumur. Rakyat Suriah tidak bisa memenuhi kebutuhan utama mereka. (Ardila, 2016)

Di tahun 2013, *Oxford Research Group* mengeluarkan laporan tentang terbunuhnya anak-anak Suriah yang telah mencapai angka sekitar 11.000 akibat konflik yang terjadi. Informasi tersebut didapatkan dari data PBB dan kelompok yang membela Hak Asasi Manusia di Negara Suriah. Sumber lain mengatakan bahwa korban dari konflik ini telah menyentuh angka 100.000 jiwa. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) menyatakan bahwa sedikitnya 2 juta warga Suriah telah menjadi pengungsi di negara-negara tetangganya, yakni Yordania, Irak, Libanon, dan Turki. Warga suriah lainnya pun mengungsi di luar wilayah tersebut. (Fahham & Kartaatmaja, 2014)

Terkait berapa banyak orang yang meninggal dunia dalam konflik ini, tidak ada angka yang dapat dipastikan jelas. Namun PBB memberikan estimasi jika korban yang meninggal dunia mencapai 400.000, sementara *Syrian Center for Policy Research* memperkiraan hingga 470.000 orang meninggal. (BBC, 2018) Sementara Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengeluarkan pernyataan bahwa pada September 2018 pihaknya telah mencatat korban yang meninggal dunia akibat konflik Suriah sebanyak 364.792 orang, dan hampir sepertiga dari mereka adalah warga sipil. (Winsor & Baker, 2018)

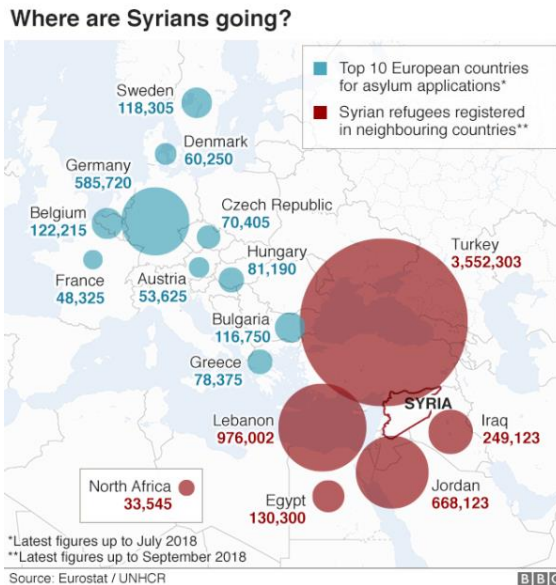
Bagi warga yang masih hidup, 85% dari mereka harus kehilangan pekerjaannya. Situasi ini semakin diperparah dengan sulitnya mencari bahan makanan, makanan menjadi langka hingga sulit untuk ditemukan, jika pun ada, harganya

sangat mahal. Sementara dalam hal pendidikan, jutaan anak tidak dapat menerima hak mereka untuk bisa mendapatkan pendidikan dari sekolah. Jutaan warga Suriah yang mengungsi ke negara lain, disebutkan UNHCR sebagai jumlah terbesar setelah kejadian Perang Dunia ke II. (Arromadloni, 2017)

Selain menyebabkan ratusan ribu kematian, perang telah menyebabkan 1,5 juta orang cacat tetap, termasuk 86.000 yang kehilangan anggota tubuh. Setidaknya 6,6 juta warga Suriah harus kehilangan tempat tinggal, sementara 5,6 juta lainnya telah melarikan diri ke luar negeri. Negara-negara tetangga seperti Libanon, Yordania, dan Turki, menjadi tempat tinggal bagi 93% dari mereka yang menjadi pengungsi. Negera-negara tersebut telah berjuang untuk mengatasi salah satu eksodus pengungsi terbesar dalam sejarah baru-baru ini. (BBC, 2018)

Berdasarkan informasi dari PBB, lebih dari lima juta warga melarikan diri dan sekitar 12 juta jiwa yang setara dengan setengah penduduk Suriah pun harus mengungsi. Besarnya jumlah pengungsi dari Suriah ini memberikan dampak dan tekanan yang besar terhadap negara-negara lainnya, seperti Lebanon, Yordania, Turki,bb serta negara lain yang turut menerima kedatangan pengungsi dari Suriah tersebut. Di Eropa pun, sekitar 105 pengungsi meminta suaka disana. Hal ini menyebabkan timbul pertanyaan dan perdebatan tentang pihak mana yang semestinya bertanggung jawab atas kejadian ini. (BBC, 2018)

Gambar 3.3. Negara-Negara Tujuan Pengungsi Suriah



Sumber: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45547595>

Pada akhir Mei 2018, tercatat sekitar 13 juta orang diperkirakan membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk 5,2 juta berada dalam situasi sangat membutuhkan bantuan. Pihak-pihak yang bertikai juga telah memperburuk masalah ini dengan menolak akses lembaga bantuan kepada banyak dari mereka yang membutuhkan. Sementara hampir 1,5 juta orang masih tinggal di daerah yang terkepung atau sulit dijangkau hingga pada Juli 2018. (BBC, 2018)

Berdasarkan pernyataan dari PBB, diperkirakan 13,1 juta orang yang memerlukan bantuan kemanusiaan di Suriah pada tahun 2018 ini akan membutuhkan sekitar \$3,5 milyar. Penduduk Suriah yang berada dalam kemiskinan ekstrem hampir mencapai 70 persen, dan sekitar 6 juta orang di sana tengah menghadapi kesulitan hebat dalam mendapatkan

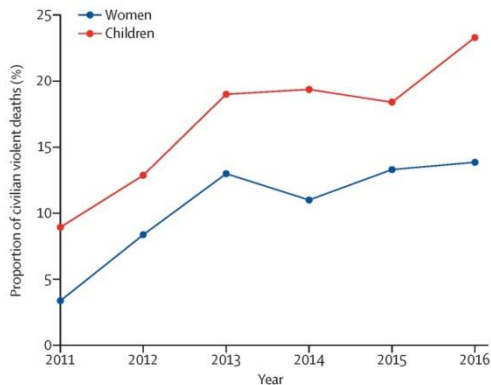
pangan dikarenakan kemiskinan dan kenaikan harga yang melonjak tinggi. Selain itu, orang-orang yang tinggal di beberapa daerah di Suriah menghabiskan 15-20 persen dari pendapatan mereka agar bisa memperoleh akses dalam mendapatkan air minum. (BBC, 2018) Lebih dari 124.000 pejuang pro-pemerintah telah tewas, sekitar setengah dari mereka adalah pasukan rezim dan sebagian yang lain merupakan sejumlah milisi Suriah dan pihak asing yang setia kepada Assad. (Winsor & Baker, 2018)

Adanya ketidakstabilan hukum dan banyaknya pelanggaran HAM di Suriah, seperti terjadinya pengeboman terhadap warga sipil, berdampak besar bagi struktur sosial di Suriah. Di Suriah, perempuan dan anak-anak banyak yang menerima ancaman dan kekerasan saat konflik suriah tersebut terjadi. Berdasarkan pernyataan ICRC, yang paling parah akibat dampak konflik Suriah adalah dari perempuan. Tercatat sekita 5,1 juta perempuan menjadi korban dari konflik Suriah. Kondisi yang dihadapi oleh perempuan-perempuan di Suriah sangatlah memprihatinkan, dimana mereka sangat sering menjadi target serangan secara langsung bahkan dari tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh ICRC di tahun 2013, persentase kematian kaum perempuan telah berada di angka 9% dari jumlah keseluruhan korban perang Suriah. Adanya pembunuhan tersebut terjadi karena tindakan penembakan terhadap warga sipil oleh pasukan militer. Selain itu, tingkat kekerasan yang dilakukan kepada perempuan di Suriah ini semakin mengalami peningkatan. Bentuk kekerasan tersebut adalah kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, penyiksaan, dan perbudakan yang dilakukan dari tentara pemerintah dan kelompok-kelompok dengan senjata. Di tahun 2013, ICRC juga melaporkan bahwa kasus pemerkosaan ini telah mencapai angka 6000 kasus. (Ardila, 2016)

Dalam konflik Suriah, anak-anak juga kerap menjadi korban dari konflik bersenjata. Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan dalam mendapatkan kekerasan.

Tidak hanya bagi kondisi fisik mereka, namun konflik ini juga memiliki dampak yang besar bagi kesejahteraan emosional dan sosial dari perkembangan anak-anak. Banyak anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan pihak lain seperti keluarganya, karena banyak dari anggota keluarganya pun meninggal akibat konflik. Tidak adanya perlindungan yang maksimal tersebut menyebabkan kelompok anak-anak seringkali menerima serangan dan kekerasan. (Ardila, 2016)

Gambar 3.4. Grafik korban perempuan dan anak-anak dalam konflik Suriah



Sumber: [https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X\(17\)30469-2/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30469-2/fulltext)

Grafik diatas memperlihatkan jumlah perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dalam konflik Suriah. Di tahun 2015, angka kematian anak-anak dalam konflik Suriah mengalami penurunan, begitupun di tahun 2014 dimana persentase kaum perempuan yang meninggal dunia akibat konflik menurun. Namun di tahun-tahun lainnya, persentase kematian anak-anak dan perempuan di Suriah terus mengalami peningkatan.

E. Peran dan Kontribusi NGO dalam Membantu Korban Konflik Suriah

Dengan banyaknya dampak yang terjadi akibat konflik tersebut, pemerintah Suriah tidak juga mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga banyak korban yang tidak dapat memperbaiki kondisi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Melihat situasi seperti itu, banyak pihak dari dalam maupun luar Suriah yang akhirnya turut turun demi memberikan bantuan bagi korban-korban konflik Suriah. Salah satu pihak yang juga berperan dan berkontribusi aktif dalam memberikan bantuan kepada korban konflik Suriah adalah *Non Governmental Organization* (NGO).

Banyak aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh NGO dalam membantu korban perang Suriah. Aksi kemanusiaan sendiri memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni perlindungan terhadap manusia serta pemberian bantuan. (Sinulingga, 2016)

Berdasarkan penjelasan yang dikeluarkan oleh Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/ UNOCHA*), prinsip-prinsip yang menjadi basis dari setiap aksi kemanusiaan internasional antara lain adalah *Humanity, Neutrality, Impartiality dan Independence*. Keempat prinsip tersebut adalah gambaran dari Hukum Humaniter Internasional serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam kerja yang dibangun oleh the *International Committee of the Red Cross* (ICRC). Prinsip-prinsip kemanusiaan menempati posisi yang sangat penting karena hal tersebut adalah komitmen paling dasar dalam kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh para aktor dalam aksi kemanusiaan tersebut, seperti salah satunya adalah NGO. Maka dari itu, bantuan-bantuan kemanusiaan yang disalurkan oleh NGO sebagai respon kemanusiaan harus dilandasi oleh prinsip-prinsip kemanusiaan. (Sinulingga, 2016)

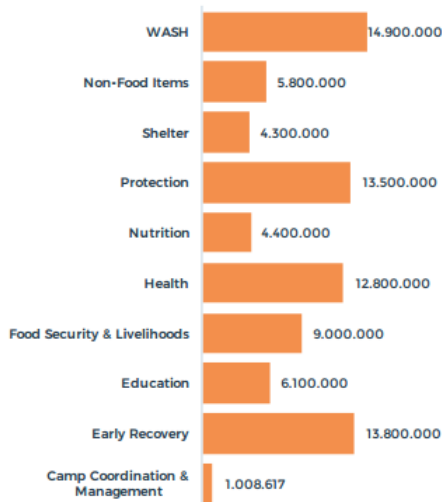
Prinsip yang pertama adalah *humanity*, yang berarti bahwa aksi kemanusiaan yang dilakukan harus memprioritaskan penyelamatan kehidupan manusia serta menghilangkan penderitaan yang dialami oleh korban. Yang kedua adalah *impartiality*, maksudnya bahwa implementasi dari aksi kemanusiaan harus dilakukan tanpa diskriminasi dengan tidak membedakan kewarganegaraan, kesukuan, agama serta ras ketika memberikan pertolongan dan bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Selanjutnya adalah *Neutrality*, itu artinya aksi kemanusiaan tidak boleh terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam konflik atau sengketa dimana aksi kemanusiaan itu dilaksanakan. Respon kemanusiaan tersebut tidak boleh memiliki keberpihakan terhadap salah satu pihak yang sedang bertikai. Sebagai aktor kemanusiaan yang netral, NGO pun harus melakukan transparansi serta keterbukaan. Prinsip yang terakhir adalah *independence*, maksudnya adalah aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh NGO mempunyai otonomi dalam mewujudkan tujuan-tujuan kemanusiaan serta terbebas dari hal-hal lain seperti tujuan politik, militer, ekonomi dan tujuan-tujuan yang lain. (Sinulingga, 2016)

Cukup banyak NGO Internasional yang berusaha masuk ke daerah konflik Suriah untuk memberikan bantuan kemanusiaan, namun tidak semua bantuan yang dikirimkan dapat berhasil masuk ke daerah konflik Suriah. Seperti yang dikatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bahwa 49,5 ton pasokan medis yang dsalurkan telah sepenuhnya ditolak oleh pemerintah Suriah. (Beals & Hopkins, 2016). Tidak hanya bantuan medis, tapi juga pasokan bahan pangan dikurangi dalam jumlah besar. Dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Suriah, PKPU-HI menjadi salah satu LSM dari Indonesia yang berhasil menyalurkan bantuan ke daerah konflik tersebut.

Proses penyaluran bantuan kemanusiaan ke daerah konflik Suriah tidaklah mudah, ada beberapa hambatan yang menyulitkan banyak pihak dalam memberikan bantuan, seperti

sulitnya izin yang diberikan oleh Suriah kepada organisasi yang ingin mengantarkan bahan pertolongan (VOA Indonesia, 2016). Selain itu, banyak lembaga bantuan kemanusiaan yang menyatakan bahwa pemerintah Suriah tidak memberikan izin masuk atau visa karena adanya pembatasan jumlah kelompok bantuan asing yang diizinkan beroperasi di Suriah (Berita Satu, 2013). Penyaluran bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Suriah juga kerap terganggu oleh rangkaian bombardir udara dan artileri yang terus terjadi, seperti adanya serangan terhadap konvoi bantuan kemanusiaan pada 19 September 2016 (BBC, 2016), penyaluran bantuan juga semakin dipersulit dengan tidak adanya akses ke daerah-daerah yang terkepung di Suriah (ICRC, 2014).

Gambar 3.5 Jumlah Warga Suriah yang Membutuhkan, Berdasarkan Sektor (*Human Response Plan, 2017*)



Sumber: https://buildingmarkets.org/sites/default/files/pdm_reports/enabling_a_local_aid_response_in_syria.pdf

Grafik diatas menggambarkan jumlah warga Suriah yang dibagi ke dalam beberapa aspek sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti yang tertera dalam grafik diatas, terdapat 10 sektor yang dibutuhkan warga Suriah, yakni kebutuhan akan air, sanitasi dan kebersihan, barang bukan makanan, tempat tinggal,perlindungan, nutrisi, kesehatan, ketahanan pangan dan mata pencaharian, pendidikan, pemulihan, serta manajemen dan koordinasi kamp. Dari kesepuluh sektor tersebut, kebutuhan akan air, sanitasi dan kebersihan menjadi sektor yang paling banyak dibutuhkan oleh warga Suriah.

Sejumlah NGO yang berhasil masuk ke Suriah membawa peran dan pengaruh yang besar bagi pemenuhan kebutuhan warga Suriah ditengah krisis yang terjadi. Banyak NGO-NGO besar yang masuk dan memberikan bantuan sebuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga Suriah dalam menghadapi situasi sulit tersebut.

Seperti NGO *International Committee of the Red Cross* (ICRC). ICRC termasuk ke dalam organisasi non pemerintahan yang terlibat langsung dalam konflik Suriah dengan tujuan untuk membantu korban-korban dalam konflik tersebut. ICRC adalah organisasi kemanusiaan yang memiliki landasan yaitu Hukum Humaniter Intenasional yang merupakan hasil dari Konvensi Jenewa. Dalam membantu korban konflik Suriah, ICRC banyak memberikan perhatiannya kepada korban perempuan dan anak-anak. ICRC memeiliki sejumlah program yang dikhususkan untuk anak-anak dan perempuan guna meminimalisir dampak konflik yang dirasakan oleh mereka. Dalam menjalankan programnya, ICRC banyak melibatkan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya, yakni UNICEF, SARC, *Women for Women*, serta NGO-NGO lain yang turut berkontribusi dalam membantu korban konflik Suriah. (Ardila, 2016)

İnsani Yardım Vakfı atau Yayasan Bantuan Kemanusiaan Turki (IHH) juga meupakan LSM besar yang kerap menyalurkan bantuan ke Suriah.

Resolusi Dewan Keamanan PBB yang secara langsung memberikan wewenang kepada badan-badan PBB dan mitra-mitra pelaksana dalam mengirimkan bantuan ke perbatasan dan daerah konflik Suriah. DK PBB mengadopsi resolusi yang bertujuan untuk meningkatkan akses ke warga sipil di daerah-daerah yang sulit dijangkau. (UN News, 2014) Hal ini merupakan langkah untuk membantu korban konflik dan memastikan agar warga Suriah dapat menerima bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan. Resolusi ini memberikan peningkatan yang besar atas bantuan yang disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. (Humanity & Inclusion)

Pada bulan Januari 2017, PBB beserta mitranya NGO mengadakan sebuah konferensi dengan naman “Mendukung Wilayah dan Rakyat Suriah”, konferensi yang diselenggarakan di Helsinki ini semakin memperlihatkan komitmen yang besar dalam memberi dukungan bagi Suriah yang sedang mengalami krisis. Konferensi ini diadakan dengan tujuan untuk meluncurkan 3RP yaitu *Regional Refugees and Resilience Plan* (Rencana Ketahanan dan Pengungsi Regional), juga untuk memberikan dukungan kemanusiaan bagi wilayah tersebut. Pada konferensi tersebut, PBB beserta NGO-NGO meminta bantuan dana sejumlah 4,63 miliar dolar AS untuk membantu sekitar 4,8 juta orang. (Antara News, 2017)

The Syrian Arab Red Crescent (SARC), sebuah organisasi bantuan kemanusiaan besar di Negara Suriah, pun telah melakukan kerja sama dengan lebih dari 40 NGO selama hampir 4 tahun guna memberikan bantuan bagi para pengungsi dan korban-korban dari konflik Suriah. Mereka mendirikan tenda-tenda pengobatan dan mobile clinic untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada yang membutuhkan. Selain itu, Didi Wahyudi, Pejabat Fungsi Politik Kedutaan Indonesia Damaskus pun turut mengungkapkan sikap keprihatinannya terhadap konflik yang terjadi di Suriah, salah satu negara yang secara historis memiliki hubungan dekat dengan Indonesia. (Liputan 6, 2015)

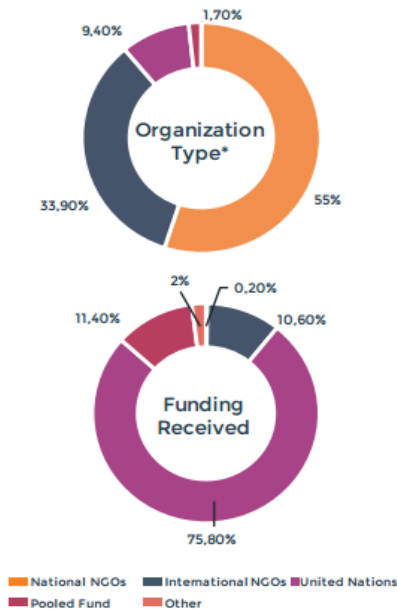
NGO ini tidak hanya menghadapi tantangan dalam memberikan bantuan kepada mereka yang kehilangan tempat tinggal di seluruh Suriah, namun juga kepada hampir tiga juta orang yang diamana daerah tempat tinggal mereka berada dalam kepungan dan sulit untuk dijangkau. Dengan banyaknya korban yang berjatuh dan warga yang hidup namun dengan kondisi yang memprihatinkan, makan penyaluran dan pengiriman bantuan pun semakin diperluas. (Building Market, 2018)

Keadaan konflik di Suriah membuat INGO menghadapi situasi yang sangat sulit dalam beroperasi secara aman di dalam negara Suriah. Seperti garis depan yang selalu berubah-ubah, infrastruktur dalam komunikasi yang masih kurang, serta adanya ancaman kekerasan yang datang secara terus-menerus dan akhirnya memaksa NGO untuk menarik kembali operasi di negara Suriah ke Yordania, Lebanon, dan Turki. Dikatakan juga bahwa lingkungan Suriah yang non-permisif ini telah melampaui kompleksnya permasalahan yang dihadapi Afghanistan dalam dekade terakhir, dan hal ini juga telah menyaingi kondisi yang terjadi di Irak. Sebelumnya, belum pernah terjadi krisis kemanusiaan dalam skala ini dimana wilayah tersebut membuat komunitas internasional sangat sulit bahkan hampir tidak mungkin untuk dapat beroperasi. (Building Market, 2018)

Berdasarkan data yang tersedia, sulitnya akses yang terjadi membawa pengaruh besar bagi kondisi warga sipil yang tinggal di wilayah tersebut. Diperkirakan bahwa biaya makanan yang dijual di daerah-daerah terkepung mencapai angka 800% lebih tinggi dibandingkan dengan biaya di daerah-daerah terdekat yang tidak berada dalam kepungan. Selain itu, di Ghouta Timur serta di banyak wilayah lain di Suriah, konvoi bantuan dari NGO kemanusiaan pun tidak dapat mengirimkan bantuan untuk menyelamatkan korban konflik. (Building Market, 2018)

Dalam respons Suriah, di mana INGO bergantung pada CSO lokal dalam pengiriman lanjutan yang berkelanjutan, OCHA melaporkan bahwa 86,4% pendanaan mengalir melalui organisasi internasional (INGO dan badan PBB). Namun, 55% mitra bersifat nasional dan mereka menerima 0,2% dari pendanaan. (Building Market, 2018)

Gambar 3.6 Grafik Pendanaan Respon Kemanusiaan Suriah oleh Organisasi



Sumber: https://buildingmarkets.org/sites/default/files/pdm_reports/enabling_a_local_aid_response_in_syria.pdf

Grafik diatas menggambarkan tentang persentase tipe-tipe organisasi yang beroperasi di Suriah, di bagi menjadi 4 tipe, yaitu *National* NGOs, *International* NGOs, PBB, dan organisasi lain-lain. NGO Nasional Suriah menempati organisasi yang paling banyak beroperasi di Suriah sdengan

persentase 55%, sedangkan NGO Internasional beroperasi sebanyak 33,90%. Grafik tersebut juga memperlihatkan pendanaan dari respon kemanusiaan Suriah yang diberikan oleh berbagai macam organisasi. PBB menjadi organisasi yang memberikan pendanaan paling besar dengan jumlah 75,80%, NGO Internasional juga memberikan pendanaan atas respon kemanusiaan di Suriah dengan persentase 10,60%.

Tidak hanya dalam bentuk bantuan, NGO juga memiliki fokus yang besar dalam aspek pendidikan yang banyak terabaikan akibat perang yang terjadi. Seperti yang dilakukan oleh Organisasi bantuan Turki, *Yesevi Aid Movement* yang melakukan perbaikan terhadap sekolah dasar di kota Bulbul yang berada di bagian utara Suriah. Mereka juga membawa kembali 150 Siswa untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Sekolah yang telah di renovasi tersebut diberi nama Eren Bülbul, berasal dari nama seorang anak muda yang meninggal dunia akibat dibunuh oleh teroris PKK di distrik Maçka di provinsi Trabzon di Laut Hitam Trabzon pada tahun 2017. Selain itu, *Yesevi Aid Movement* juga melakukan renovasi terhadap panti asuhan dan pusat kebudayaan di kota. (Daily Sabah, 2019)

Tidak hanya *Yesevi Aid Movement*, NGO yang berasal dari Turki lainnya yaitu *Humanitarian Relief Foundation* (IHH) pun turut berkontribusi dalam menyalurkan bantuan ke Suriah. IHH telah aktif berperan dalam membantu korban Suriah sejak tahun 2001. IHH banyak mengirimkan bantuan bahan makanan, bantuan kesehatan, serta perumahan di Suriah. IHH mendistribusikan paket makanan kepada warga Suriah yang berisikan kebutuhan dasar warga, seperti tepung, gula, minyak dan kacang-kacangan. Paket tersebut disebar di berbagai provinsi, yakni provinsi Bizaah, Jarablus, Ahtarin, serta Azaz di Suriah utara. Mereka memberikan bantuan utama dalam bentuk makanan karena hal tersebut menjadi kebutuhan utama warga Suriah. (Daily Sabah, 2019)

Syria Care, salah satu NGO yang berasal dari Malaysia dan didirikan oleh Sheikh Samir Sakka pada tahun 2012 dengan tujuan untuk menyebarkan kesadaran dan menyalurkan kontribusi bagi warga-warga Suriah yang membutuhkan bantuan. *Syria Care* memiliki visi yakni untuk menyebarkan kesadaran global dalam rangka memberikan bantuan terus menerus kepada para korban bencana kemanusiaan di Suriah. (*Syria Care*) NGO ini telah masuk ke Suriah untuk memulai misi kemanusiaan pada musim dingin yaitu *Syria Care 7.0* (BMS 7.0). *Syria care* melakukan distribusi bantuan untuk korban konflik dan para pengungsi Suriah di beberapa negara, seperti Lebanon dan Turki. Misi yang dilakukan *Syria Care* ini mendistribusikan beberapa bantuan berupa pakaian musim dingin, kaus kaki, sarung tangan dan selimut untuk para korban dalam menghadapi musim dingin. Kegiatan tersebut dikatakan sebagai misi mendesak karena dalam situasi tersebut, negara sedang menghadapi musim dingin, namun para pengungsi justru tidak memiliki pakaian serta perlengkapan lain yang dapat melindungi mereka dari kedinginan. (Yaacob, 2018)

Ketua *Syria Care*, Siti Sakinah Meor Omar Baki, menyatakan bahwa demi kelancaran misi yang mereka lakukan, *Syria Care* melakukan kerja sama dengan NGO *Turki Turkiye Diyanet Vakfi* (TDV) dalam melakukan distribusi barang-barang bantuan ke kamp-kamp pengungsi di Azzaz, Turkmen Barih serta Jarablus di Aleppo utara. (Yaacob, 2018)

Islamic Relief menjadi salah satu NGO yang memiliki pengaruh besar dalam memberikan bantuan bagi korban konflik Suriah. Dimana NGO ini telah memberikan respon terhadap krisis yang terjadi di Suriah sejak tahun 2011. *Islamic Relief* beroperasi di wilayah perbatasan untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi orang-orang yang menjadi korban dalam kekerasan. Di tahun 2012, *Islamic Relief* pun telah bergerak lebih jauh dalam menjangkau keluarga yang berada dalam kondisi rentan. Terhitung sejak awal konflik terjadi, *Islamic Relief* telah menyalurkan bantuan lebih dari £ 239 juta

di Suriah serta kepada negara-negara tetangga demi membantu jutaan warga Suriah. *Islamic Relief* mendistribusikan pakaian, pasokan medis, dan paket makanan kepada kelompok-kelompok yang dikepung di dalam wilayah Suriah. Tidak hanya itu, *Islamic Relief* juga memberi dukungan serta menyediakan program-program mata pencaharian, dalam aspek pendidikan, serta dukungan terhadap kondisi psikososial para pengungsi yang berada di Lebanon, Yordania juga Irak. *Islamic Relief* juga turut membantu para pengungsi Suriah di wilayah Eropa yang tersebar di berbagai negara seperti di Yunani, Makedonia, Jerman dan Italia. (*Islamic Relief*)

PKPU-HI menjadi salah satu NGO yang berhasil menyalurkan bantuan kemanusiaan ke daerah konflik sejak Februari 2013. Saat itu, bantuan yang diberikan adalah berupa makanan, pakaian dan perlengkapan dalam menghadapi musim dingin. Selanjutnya PKPU-HI terus menyalurkan bantuan kepada korban konflik Suriah yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka serta melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk membantu warga sipil korban perang (Achyar, 2013). Meskipun ada banyak hambatan, penyaluran bantuan kemanusiaan kepada Suriah masih dilakukan oleh PKPU-HI hingga saat kajian ini tulis pada bulan Oktober 2018. Berhasil atau tidaknya proses penyaluran bantuan kemanusiaan ini tidak terlepas dari strategi yang dimiliki oleh PKPU-HI.

PKPU-HI juga merupakan salah satu NGO yang aktif dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan ke daerah konflik Suriah, PKPU-HI berhasil menyalurkan bantuan kemanusiaan ke daerah konflik sejak Februari 2013. Saat itu, bantuan yang diberikan adalah berupa makanan, pakaian dan perlengkapan dalam menghadapi musim dingin. Selanjutnya PKPUHI terus menyalurkan bantuan kepada korban konflik Suriah yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka serta melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk membantu warga sipil korban perang (Achyar, 2013).

Bantuan yang diberikan oleh PKPU-HI ke Suriah terus berlanjut, di tahun 2018, NGO ini mengirimkan bantuan untuk warga yang menjadi korban perang Suriah. Bantuan yang dikirimkan oleh PKPU-HI adalah berupa alat-alat untuk penanganan medis, tikar, selimut, dan bahan makanan. Bentuk bantuan tersebut diberikan setelah adanya kajian dan koordinasi antara PKPU-HI dengan mitra lokal, dimana yang menjadi kebutuhan prioritas warga Suriah adalah bantuan medis. Hal ini melihat dari banyaknya jumlah korban dari warga sipil namun disisi lain sejumlah rumah sakit hancur dikarenakan adanya serangan udara dari militer Suriah.